

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik Darfur adalah konflik yang terjadi sebagai lanjutan atau akibat dari konflik yang telah terjadi sebelumnya, yaitu konflik antara utara dan selatan. Sejak tahun 1924, Inggris menjalankan kebijakan pemisahan pemerintahan Sudan menjadi Sudan Selatan yang mayoritas beragama Kristen dan Animisme; dan Sudan Utara yang mayoritas muslim. Penduduk wilayah utara yang tinggal di wilayah lebih dari garis lintang 10° LU tidak boleh berpindah ke wilayah selatan dan sebaliknya penduduk selatan dibawah garis lintang 8° LU dilarang berpindah ke wilayah utara.¹ Kebijakan itu diklaim untuk mencegah penyebaran Malaria, namun sejatinya juga untuk mendukung misionaris guna menyebarkan Kristen di Sudan Selatan dan menghalangi penyebaran Islam dan tradisi muslim. Inggris pun membangun kesadaran identitas penduduk Sudan wilayah selatan, bahwa mereka adalah penduduk asli Afrika (yang berbeda dengan Utara). Hasilnya adalah semakin intensifnya pemisahan Sudan Selatan dari Sudan Utara. Ini menjadi bibit konflik di kemudian hari. Tidak hanya itu, Inggris pun membangun pola pemerintahan tradisional di bawah pimpinan para syaikh di Utara dan pemimpin suku di Selatan yang memberikan andil terhadap lemahnya sistem pemerintahan Sudan dikemudian hari.

¹ *Maklumat Politik Sudan*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/14/maklumat-politik-sudan/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2010

Setahun menjelang kemerdekaan, pada tahun 1955, perang sipil mulai terjadi antara Sudan Selatan dan Sudan Utara. Sudan Selatan yang tentu saja lebih loyal kepada Inggris takut kalau pasca kemerdekaan akan didominasi oleh Sudan Utara yang dinilai dekat dengan Mesir yang loyal kepada AS. Kemerdekaan Sudan 1956 itu akhirnya disertai terjadinya perang sipil pertama (*Civil War I*) antara Sudan Selatan dan Sudan Utara. Civil War I ini berlangsung dari 1955 – 1972. Pada tahun 1972 disepakati perjanjian penghentian perang dalam perjanjian Addis Ababa (*Addis Ababa Agreement - AAA*) yang disponsori oleh Dewan Gereja Dunia (*World Council of Churches*).²

Pada saat Sudan merdeka, terjadi perebutan pengaruh antara Inggris dengan Amerika yang menggunakan tangan Abdul Nasher. Meski yang menjadi PM Sudan adalah Ismail Azhari yang dekat dengan Abdul Nasher dan termasuk loyalis Amerika, namun kekuasaan sebenarnya di Sudan masih berada di tangan orang-orang yang loyal kepada Inggris. Sehingga Sudan meski sudah merdeka, tetap berada di bawah pengaruh Inggris. Dalam hal ini masalah Sudan Selatan – Sudan Utara dijadikan oleh Inggris sebagai alat politik untuk menjamin agar Sudan tetap berada di bawah pengaruhnya.

Selama ini pemberontak di Sudan Selatan sangat loyal kepada Inggris. AS bisa dikatakan tidak memiliki pengaruh terhadap kelompok pemberontak Sudan Selatan. Namun seiring dengan perkembangannya, AS berubah haluan menjadi pendukung Sudan Selatan. Dukungan AS kepada Sudan Selatan

²*Ibid*

tersebut diwujudkan dengan melatih dan mempersenjatai pemberontak Sudan Selatan, SPLA. Lebih dari 20 miliar dolar peralatan militer telah dikirimkan AS kepada pemberontak SPLA.

Pada bulan Juli 2002, Pemerintah dan SPLA mencapai kesepakatan tentang kekuasaan negara dan agama, dan hak menentukan nasib sendiri bagi Sudan Selatan. Kesepakatan itu dinamakan Protokol Machakos.³ Ditetapkannya hak menentukan nasib sendiri, pembagian kekayaan dan kekuasaan di dalam Protokol Machakos ini merupakan satu hal yang sangat berbahaya. Karena dengan diakuinya itu, akan terbuka pintu bagi propinsi dan daerah-daerah lainnya untuk menuntut hal yang sama. Dan dalam hal ini pihak yang memprovokasi Sudan Selatan atau terutama John Garang yaitu AS juga memprovokasi propinsi dan daerah lainnya untuk menuntut hal yang sama. Hal itu diisyaratkan pada berkembangnya masalah yang disebut masalah daerah-daerah marjinal yaitu Nuba Mountain, Selatan Nil Biru, Sudan Timur dan Darfur. Dan terbukti kemudian meletus konflik Darfur yang diantara tuntutan-tuntutannya adalah tuntutan untuk mendapat perlakuan yang sama dengan Sudan Selatan.

Darfur, tak akan dikenal oleh dunia apabila tidak ada krisis yang muncul di sana. Krisis Darfur mulai muncul di peta dunia ketika beberapa LSM internasional seperti International Crisis Group, Human Watch International, dan Amnesty International menyebutkan munculnya pembantaian massal (genocide), pembunuhan, pemerkosaan, dan pengusiran secara besar-besaran etnis Fur dan

³*Ibid*

Massaleit di Darfur oleh milisi yang dikenal dengan nama, Janjaweed.⁴

Darfur adalah sebuah daerah di Sudan bagian barat jauh, yang berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Chad. Berbeda dengan beberapa civil war yang pernah terjadi di Sudan, konflik bersenjata yang terjadi di Darfur bukan disebabkan oleh permasalahan agama, tetapi konflik etnis yang disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, yang memberikan stimulus terhadap potensi-potensi konflik yang ada di Darfur.⁵ Faktor utama penyebab pecahnya perang saudara di Darfur menyangkut dengan faktor-faktor survival mengenai bagaimana hidup di Afrika yang sangat konfliktual. Konflik ini disebabkan oleh permasalahan dasar survival, yaitu kekeringan, overpopulation, dan desertifikasi.⁶ Oleh karena tiga faktor ini, para nomaden pastoralis Baggara (dalam bahasa Arab Baqqara) mulai mencari persediaan air ke arah selatan. Di daerah di mana para nomaden Baggara itu berusaha mendapatkan persediaan airnya, terjadilah “gesekan” dengan penduduk asli yang mayoritas adalah bangsa Afrika berkulit hitam. Karena adanya akar konflik dalam sentimentil etnis antara masyarakat Afrika berkulit hitam dengan nomaden Baggara yang merupakan bagian dari ras Arab, akhirnya konflik pun meletus pada Februari 2003. Pada tahun 2003 dua kelompok bersenjata melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Sudan yang pada saat itu didominasi oleh etnis ras Arab. Dua kelompok pemberontak itu adalah Justice and Equality Movement (JEM) dan Sudanese Liberation

⁴*Konflik Sudan Sungguh Sangat Kompleks*, Suara Merdeka, Kamis 29/7/2004

⁵*Sudan*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Sudan>, diakses pada tanggal 01 Januari 2010

⁶*Looking to water to find peace in Darfur*". Reuters AlertNet. 2007-07-30, <http://www.alertnet.org/db/blogs/1265/2007/06/30-100806-1.htm> , diakses pada 28 Desember 2009

Army/Movement (SLA/SLM). Kekerasan-kekerasan kerap terjadi dari tahun tersebut sampai pada masa sekarang, dan hal ini menyebabkan instabilitas politik dan keamanan yang ada di Darfur. PBB menyatakan bahwa korban yang disebabkan oleh konflik yang terjadi di Darfur berjumlah 200.000 sampai 500.000 orang. PBB juga menyatakan bahwa akibat konflik yang terjadi di Darfur, sekitar lebih dari 2.000.000 orang kehilangan tempat tinggalnya dan terpaksa mengungsi ke daerah teritorial Chad. Oleh karena alasan pertimbangan kemanusiaan yang serius, maka ICC menetapkan bahwa tersangka utama dari konflik yang ada di Darfur adalah presiden Sudan, yaitu Presiden Omar Al-Bashir.⁷

Dengan kondisi yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi di Sudan sangat berkontribusi untuk menimbulkan kemiskinan, kelaparan, pengungsian, instabilitas politik, sekaligus ancaman keamanan internasional. Maka tidak heran jika konflik-konflik tersebut mengundang keterlibatan dari negara-negara non Afrika, seperti Amerika Serikat, Cina, Inggris, dan Eropa. Dimanapun peristiwa kekerasan, peperangan, dan konflik komunal lain, memang memiliki akar sejarah yang panjang. Demikian halnya dengan Sudan. Sejarah konflik dan kekerasan di negeri yang berbatasan dengan Mesir ini telah terjadi jauh sebelum negeri ini merdeka di tahun 1956. Konflik kekerasan ini berakar kuat pada identitas agama dan etnik, selain faktor sosial-ekonomi dan perebutan akses sumber

⁷*Darfur: A 'Plan B' to Stop Genocide?'*. US Department of State. 2007-04-11. <http://www.state.gov/p/af/rls/rm/82941.htm>, diakses pada 28 Desember 2009

daya alam. Identitas agama, kelas sosial, dan etnik, juga punya kontribusi penting dalam menyulut konflik dan kekerasan di Sudan.

Berbagai cara dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Sudan. Salah satunya adalah dengan melalui perjanjian damai. Tanggal 01 Januari 2005 di Kenya, wakil-wakil pemerintah dan laskar pembebasan rakyat Sudan menanda-tangani perjanjian damai untuk mengakhiri perang saudara yang terjadi di Sudan. Sebuah perjanjian damai yang final, yang mencakup semua perjanjian yang dicapai sebelumnya, akan ditanda-tangani tanggal 9 Januari 2005. Namun, kekerasan demi kekerasan terus berlanjut karena rezim Khartoum sering mengkhianati perjanjian. *Peace Agreement* yang ditandatangani pemerintah pusat dengan kubu pemberontak di Sudan Selatan, Sudan People's Liberation Movement (SPLM) juga ternoda oleh kematian mendadak dan misterius pemimpin pemberontak, Dr. John Garang, pada sebuah kecelakaan helikopter 30 Juli 2005. Kaum pemberontak di Sudan Selatan menuduh rezim Khartoum berada di balik aksi pembunuhan itu. Kerusuhan pun kembali meledak sehingga menyebabkan ribuan orang terbunuh.⁸

Berbagai konflik yang terjadi di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Islam ini lebih banyak dipicu oleh faktor eksternal ketimbang internal di antara umat Muslim di negara-negara tersebut, sama halnya dengan konflik yang terjadi di Darfur, Sudan. Sudan sempat goyang akibat konflik Darfur, tetapi saat ini kondisi keamanan dan politik mulai stabil.

⁸*Ibid*

Meski demikian, Barat selalu berusaha mengganggu stabilitas karena ingin meraup kekayaan alam Sudan, terutama di Darfur. Penyebab utama kegoncangan dan kerusakan di negeri-negeri tersebut adalah faktor eksternal, yakni penjajahan AS dan sekutunya. Sebagaimana diketahui, saat ini AS sedang melancarkan imperialismenya di negeri-negeri Muslim melalui dua cara. *Pertama*, melalui intervensi militer, seperti yang sedang dipertontonkan AS saat ini di Irak dan Afghanistan. *Kedua*, intervensi non militer yang berupa politik dan ekonomi. Imperialisme seperti inilah yang diterapkan AS dan sekutunya di negeri-negeri Muslim lainnya termasuk Sudan. Alat utama yang digunakan AS untuk memuluskan imperialismenya tersebut adalah globalisasi. Sehingga bagi negara-negara Dunia Ketiga yang notabene adalah negeri-negeri Muslim, globalisasi tidak lain adalah imperialisme baru yang menjadi mesin raksasa produsen kemiskinan yang bengis dan tak kenal ampun. Pada dasarnya, globalisasi yang dimotori AS merupakan proses menjadikan sistem ekonomi kapitalis ala Amerika Serikat sebagai sistem dominan di dunia, dengan mengintegrasikan perekonomian lokal ke dalam tatanan perekonomian global melalui privatisasi, pasar bebas, dan mekanisme pasar pada semua perekonomian negara-negara di dunia. Ini berarti penghapusan semua batasan dan hambatan terhadap arus perpindahan barang, modal, dan jasa yang bersandar pada kekuatan pengaruh Amerika Serikat. Dan inilah yang sedang dijalankan oleh Amerika di Sudan.⁹

⁹*Ibid*

Apa yang sebenarnya terjadi di Darfur ? Banyak media menyebutkan bahwa telah terjadi pembantaian, pemerkosaan dan pengungsian secara besar-besaran di Darfur akibat konflik antara milisi yang dikenal dengan nama Janjaweed dan etnis tertentu di Darfur. AS pun mulai terlibat lebih jauh dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Darfur, misalnya dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Namun sayangnya di balik penyaluran bantuan kemanusiaan kepada jutaan pengungsi di Darfur, Sudan, diduga kuat diselipkan paket-paket berupa senjata yang ditujukan kepada pemberontak Sudan dalam melawan pemerintah setempat. Masyarakat internasional menyebut krisis ini sebagai "the worst humanitarian crisis of our time", bahkan pada tanggal 22 Juli 2004, Kongres AS mengeluarkan sebuah resolusi yang mendesak Pemerintahan Bush untuk menyebut krisis ini sebagai genocide.¹⁰

Dalam sebuah polling di Amerika, "Americans on the Crisis in Sudan", 69% responden menyatakan bahwa PBB dan AS, bila perlu, harus mempergunakan kekuatan senjata untuk menghentikan krisis ini. Pada tanggal 2 Agustus 2004, National Association of Evangelicals, sebuah asosiasi kelompok Evangelis di Amerika mengirim surat untuk Presiden Bush dengan tujuan agar Bush melakukan "swift action" untuk menghentikan krisis di Darfur.¹¹

Sudan menjadi tempat pertempuran antara Amerika dan Eropa. Amerika menginginkan berdirinya negara Sudan Selatan untuk menguasai

¹⁰*Krisis Darfur dan Kepentingan Amerika*, <http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-OOT-FW-Krisis-Darfur-dan-Kepentingan-Amerika>, diakses pada tanggal 19 Maret 2010

¹¹*Ibid*

sumber daya alam di sana, sedangkan negara-negara Eropa terutama Inggris, Perancis, dan Jerman tidak menginginkan bercokolnya Amerika di wilayah Afrika. Karena itu, kedua belah pihak inilah yang merancang konflik di Sudan dengan memanfaatkan permasalahan internal yang sudah ada dan ketidakmampuan pemerintah Sudan mengatasinya. ICC berkedudukan di wilayah Eropa sehingga tidak aneh keputusan ICC sangat condong pada kepentingan Eropa. Inggris, Perancis, dan Jerman merancang agar kasus Darfur menjadi kelihatan lebih besar melalui media dan membuatnya lebih besar lagi dengan menjadikannya sebagai permasalahan kejahatan perang. Sementara Amerika Serikat berada dalam posisi tidak mendukung keputusan ICC, sebab hal itu tidak sesuai dengan kepentingan AS. Namun, AS tidak ingin ketidaksetujuannya tersebut nampak di mata internasional sebagai penentangan. Amerika memberikan solusi yang moderat kepada Presiden Bashir terhadap keputusan ICC. AS menawarkan agar Sudan segera melaksanakan pemilu dengan syarat Presiden Bashir tidak diperbolehkan mengikutinya. Jika usul AS diterima Sudan, AS berjanji akan mendukung pelaksanaan butir 16 aturan dasar ICC yang dapat menunda penangkapan Bashir selama satu tahun dan penundaan ini bisa diperpanjang. Dari strategi politik AS ini, nampak Amerika menganggap Bashir tidak dapat diandalkan lagi untuk mengamankan kepentingannya di Sudan. Eropa berhasil membuat cacat Bashir di mata internasional. Karena itu AS menginginkan adanya kepemimpinan baru di Sudan yang tidak memiliki cacat di mata

internasional.¹²

AS takut jika Sudan menjadi negara Islam yang kuat. Ketakutan AS atas kebangkitan Islam membuat mereka terus berupaya untuk melemahkan setiap negara mayoritas muslim, sekaligus memanfaatkan negara tersebut untuk kepentingannya. AS tentunya tidak akan membiarkan kebangkitan Sudan ini terjadi. Bila Sudan bangkit, maka akan bertambah jumlah negara Islam yang berani menentang AS, seperti Iran, Suriah, Palestina, dan lainnya. Dan tentunya ini akan menstimulus kebangkitan seluruh negara Islam lainnya. Untuk itu, AS terus berusaha melemahkan Sudan, melalui International Criminal Court (ICC) dan lainnya. AS sadar bahwa menggunakan kekuatan militer bukanlah cara efektif, karena harus menguras dana besar dan menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Penyerangan AS terhadap satu-satunya pabrik obat di Sudan pada tahun 1998 terbukti tidak melemahkan Sudan. Selain itu tekanan dunia atas serangan militer akan sangat merugikan AS. Cara lain untuk melemahkan Sudan adalah dengan memblokadanya, seperti yang AS terapkan pada Iran, Gaza, dan lainnya. Namun hal ini juga tidak mungkin efektif. Oleh karena itu, AS kembali menerapkan konspirasi lama yang hingga kini terbukti masih efektif di beberapa negara. Yaitu menyuburkan konflik internal, mengkotakkannya menjadi negara-negara kecil. Setelah negara tersebut lemah, giliran sumber daya alam yang akan diraup secara mudah.¹³

¹²*Sudan Membutuhkan Khilafah*, Jurnal Ekonomi, 07 Maret 2009

¹³*AS Incar Migas Sudan*, <http://www.mail-archive.com/zamanku@yahoogroups.com/msg07073.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2010

Apa yang dibutuhkan oleh Sudan saat ini adalah membangun sebuah konsensus internasional atas sebuah strategi penerapan secara penuh Kesepakatan Damai Menyeluruh (CPA) di Sudan. CPA akan mengakhiri perang sipil panjang di Afrika, yang memakan korban tewas hingga dua juta orang. Perjanjian ini tak hanya menjadi pertanda keinginan merdeka di Sudan Selatan, tetapi juga mensyaratkan sebuah demokratisasi di Sudan.¹⁴

CPA merupakan perjanjian yang dimotori oleh Amerika, yang memandatkan dibentuknya Pemerintahan Persatuan Nasional (Government of National Unity) yang baru dan pemerintahan peralihan di Sudan Selatan serta menyerukan pembagian kekayaan, pembagian kekuasaan dan pengaturan keamanan diantara kedua pihak.¹⁵ Disamping harus dilakukan penarikan militer Sudan dari Selatan pembentukan unit militer gabungan, repatriasi dan pemukiman kembali pengungsi. Jika beberapa ketentuan CPA terpenuhi, maka harus dilakukan pemilu menyeluruh pada semua level, termasuk presiden, gubernur negara bagian (propinsi) dan legislatif nasional dan propinsi. Pemilu itu harus diluncurkan paling lambat Juli 2009. CPA juga mencakup susunan Legislatif Nasional, keikutsertaan dalam kabinet, pembentukan pemerintahan di Sudan Selatan, penyusunan Konstitusi Sudan Selatan dan telah disahkan pada Desember 2005, keikutsertaan dalam jabatan gubernur negara bagian, dan pengadopsian Konstitusi Peralihan dan telah diratifikasi pada 5 Juli 2005. CPA juga memandatkan pembentukan berbagai

¹⁴ *Masalah Besar di Sudan*, http://dunia.vivanews.com/news/read/60336-masalah_besar_di_sudan, diakses pada tanggal 08 Januari 2010

¹⁵ *Maklumat Politik Sudan*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/14/maklumat-politik-sudan/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2010

komisi: Komisi Evaluasi dan Penilaian (Assessment and Evaluation Commission), Komisi Minyak Nasional (National Petroleum Commission), Komisi Alokasi dan Pengawasan Fiskal dan Keuangan (Fiscal and Financial Allocation and Monitoring Commission), dan Komisi Perbatasan Utara-Selatan (The North-South Border Commission). Sebagai bagian dari pengaturan keamanan CPA dibentuk Komisi Gencatan Senjata dan Politik (The Ceasefire Political Commission), Dewan Pertahanan Gabungan (Joint Defense Board), dan Komisi Gencatan Senjata Militer Gabungan (Ceasefire Joint Military Committee). CPA memandatkan adanya masa peralihan selama enam tahun. Setelah itu, CPA memandatkan dilangsungkannya referendum di Selatan untuk memutuskan apakah terpisah alias merdeka atau tetap bersatu dengan Sudan Utara.¹⁶

Karena Utara memiliki kapasitas, namun tak memiliki kemauan politik untuk menerapkan CPA, dan Selatan tak memiliki kapasitas ini, ditambah ketidaksepakatan komunitas internasional, makin membuat muram prospek perdamaian. Pemerintah di Sudan Selatan kini menderita karena masalah keuangan, dan memiliki asumsi yang tidak realistis tentang pendapatan dari hasil alam. Sebagai hasilnya, kemampuan untuk membangun pelayanan dan kapasitas militer untuk menanggapi setiap manuver pemerintahan Khartoum atas kesepakatan damai merupakan masalah serius untuk dikompromikan. Hanya Amerika Serikat yang dapat menciptakan situasi untuk implementasi CPA. Presiden George W. Bush, yang dua kali menerima Presiden Sudan Selatan

¹⁶*Ibid*

Salva Kiir di Gedung Putih, menyetujui program tahun 2006 untuk merubah SPLA menjadi tentara profesional.¹⁷ Bantuan finansial sudah tentu vital, namun komitmen politik dari komunitas internasional jauh lebih penting. Sebagai contoh, meski Misi PBB untuk Sudan sudah disetujui untuk memonitor implementasi CPA, masalah Darfur tetap memonopoli perhatian. Lebih jauh, apa pun monitoring yang diambil di wilayah ini mesti disertai aksi nyata.

Mengakhiri krisis di Darfur, Sudan dan memastikan stabilitas jangka panjang melalui pelaksanaan Perjanjian Damai Komprehensif (CPA) adalah prioritas utama bagi Presiden AS, Barack Obama. Krisis kemanusiaan di sana membuat tugasnya lebih mendesak. Presiden telah menunjuk Utusan Khusus untuk Sudan sebagai sinyal kuat komitmennya untuk mendukung rakyat Sudan. AS berkomitmen untuk bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk mengakhiri penderitaan, mencari penyelesaian yang langgeng kekerasan, dan menjamin masa depan yang stabil dan aman untuk daerah.¹⁸

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang diajukan adalah **“Apa kepentingan Amerika dalam Konflik Darfur di Sudan?”**

¹⁷*Masalah Besar di Sudan*, http://dunia.vivanews.com/news/read/60336-masalah_besar_di_sudan, diakses pada tanggal 08 Januari 2010

¹⁸*Foreign Policy Issues*, <http://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy>, diakses pada tanggal 19 Maret 2010

C. Kerangka Pemikiran

Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. *Dalam arti luas*, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu.

Politik luar negeri didefinisikan sebagai “*a strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis-à-vis other state or international entities to achieve a specific goal defined in terms of national interest*”.¹⁹

Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa. Dari uraian di atas sesungguhnya dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional.

Konsep kepentingan nasional adalah konsep yang paling populer dalam analisa hubungan internasional, baik itu untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramal, maupun menganjurkan perilaku internasional. Kepentingan nasional sendiri dianggap sebagai faktor yang paling ajeg serta berfungsi sebagai penunjuk arah bagi para pembuat keputusan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, karena dalam melakukan interaksi dengan negara lain di lingkungan internasional, setiap negara berupaya untuk

¹⁹Jack C Plano, Roy Olton, *The International Dictionary, the Third Edition*, England: Clio press Ltd, 1982

mencapai apa yang menjadi tujuan negaranya. Keberhasilan suatu negara juga dilihat dari keberhasilannya dalam mencapai dan mempertahankan kepentingan nasionalnya karena kepentingan nasional merupakan hal mendasar dari setiap negara. Atas dasar upaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu pulalah yang dapat mempengaruhi sikap suatu negara dalam menanggapi isu tertentu dan cara berhubungan dengan negara lain.

Kepentingan nasional sendiri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton didefinisikan sebagai berikut :

“The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of state in making foreign policy. The national interest is typical a highly generalized conceptions of these element that constitute to the state most vital nees. There include self preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being.”²⁰

Self preservation merupakan hak suatu negara untuk mempertahankan eksistensi negaranya. Self preservation dapat diartikan juga sebagai usaha suatu negara untuk mempertahankan jati diri atau identitas negaranya di tengah perkembangan global, dimana eksistensi menjadi penting dalam pergaulan internasional sebagai bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain. Hal ini menjadi penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara dalam pergaulan internasional.

Independence diartikan sebagai kemerdekaan atau kebebasan suatu negara untuk dapat menentukan nasibnya sendiri dengan tidak terkait atau

²⁰*Ibid*

terjajah oleh negara lain sehingga dapat menentukan sikap dalam menentukan keputusan politiknya. Kemerdekaan tersebut juga akan turut mempengaruhi kelangsungan hidup dan pengakuan suatu negara dalam kancah internasional.

Territorial integrity dapat diartikan sebagai suatu integritas wilayah. Keutuhan dan kesatuan wilayah merupakan suatu bentuk kedaulatan suatu negara, dimana kedaulatan tersebut menjadi suatu bentuk eksistensi dan pengakuan tertinggi atas keberadaan suatu negara dalam politik internasional. Kesatuan wilayah juga turut berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan politik suatu negara yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan suatu negara.

Military security atau keamanan militer adalah hal yang sangat penting bagi stabilitas dan eksistensi suatu negara. Hal tersebut dikarenakan adanya kecenderungan bahwa negara yang memiliki kuantitas dan kualitas persenjataan yang kuat, maka negara tersebut akan lebih memiliki bargaining position dan power yang besar dimana dapat mempengaruhi posisinya dalam hubungan antarnegara.

Mengenai economic well-being, penulis mengartikannya sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi, dimana kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu pilar penyokong bagi kestabilan suatu negara. Kestabilan ekonomi merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Kestabilan ekonomi ini mencakup kestabilan dan keamanan perekonomian termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan asset dan sumber daya alam.

Bila kita perhatikan, kepentingan nasional AS dijalankan sesuai dengan konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ahli hubungan internasional yang mendefinisikan bahwa kepentingan nasional suatu bangsa akan terkait erat dengan masalah internal dan masalah eksternal. Hans J. Morgenthau menyampaikan pandangan tentang konsep kepentingan nasional sebagai berikut:

*“The concept of the national interest, then, contains two elements, one that is logically required and in that sense necessary, and one that is variable and determined by circumstances.”*²¹

Dengan demikian konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau pada dasarnya terdiri dari dua elemen, yang pertama didasarkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri, dan yang kedua mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan strategis disekitarnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sendiri, dapat di peroleh dengan cara melindungi kelangsungan hidup bangsa dalam mempertahankan kedaulatan integritas wilayah nasional, sistem politik, dan identitas budaya dari ancaman bangsa lain. Adapun pertimbangan adanya berbagai kondisi lingkungan strategis adalah dengan menjalankan kebijakan politik luar negeri melalui upaya diplomasi demi terciptanya perdamaian dunia.²²

Analisis sering memakai konsep “kepentingan nasional” sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Dalam pembahasan

²¹*Kepentingan Nasional*, <http://gemapatria.blogspot.com/2009/07/kepentingan-nasional.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2010

²²*Ibid*

mengenai kepentingan Amerika dalam Konflik Sudan, penulis memandang bahwa kepentingan nasional yang menjadi fokus utamanya adalah economic well being. Munculnya faktor minyak bumi di Sudan memperumit konflik yang telah terjadi. Karena faktor ini membawa kepentingan negara-negara yang membutuhkan akses terhadap sumber minyak bumi di masa yang akan datang dan salah satu negara yang termasuk berkepentingan terhadap sumber minyak bumi ini adalah Amerika Serikat (AS). Sasaran Amerika Serikat adalah untuk mendapatkan sumber daya alam di Sudan, karena Sudan dianggap sebagai daerah yang potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi negaranya.

Sebagaimana diketahui bahwa faktor kesenjangan ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya kekacauan atau permasalahan lain, seperti kelaparan dan kemiskinan yang dapat memicu tindakan kriminal lain seperti pencurian, penjarahan, dan kekacauan lainnya. Kenaikan harga minyak terutama disebabkan oleh semakin meningkatnya kebutuhan akan minyak, khususnya dipicu oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara kekuatan ekonomi baru seperti Cina dan India. Semakin bertambah penduduknya dan naik taraf hidupnya, semakin tinggi kebutuhannya akan energi, khususnya minyak bumi dan gas. Namun demikian, Amerika tetaplah faktor dominan tersendiri yang akan terus menyebabkan harga minyak merangkak naik.

Hingga tahun 2020 nanti, konsumsi minyak Amerika akan meningkat sebesar 6 juta barrel per hari, sedangkan tingkat produksi dari ladang-ladang

minyak di dalam negeri Amerika, dengan telah memperhitungkan kemungkinan penemuan ladang-ladang minyak baru di dalam negeri, akan menurun sebanyak 1,5 juta barrel per hari. Guna memenuhi kebutuhan minyak Amerika pada 2020, maka diperlukan impor minyak sebanyak 7,5 juta barrel per hari yang merupakan 70% dari kebutuhan minyak total Amerika (saat ini total impor minyak sekitar 58% dari kebutuhan total Amerika).²³ Pada saat yang sama, pasokan minyak ke pasar dunia justru semakin menurun karena telah semakin mengeringnya sumur-sumur minyak di dunia, sedangkan cadangan lainnya banyak terdapat di laut dalam yang biaya eksploitasinya sangat mahal.

Melihat kebutuhan minyak di Amerika yang semakin meningkat, maka pemerintahan Amerika melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya adalah dengan memanfaatkan instabilitas politik di Sudan. Konflik yang terjadi di Sudan tak lepas dari kondisi kebutuhan energi di masa depan yang dihadapi Amerika, sebagai bagian dari strategi guna melanggengkan imperium Amerika. Amerika Serikat yang dahulu ingin melakukan pendekatan yang halus untuk mendapatkan bagian dari minyak Sudan kini terpaksa menggunakan cara-cara neokonservatif khas Amerika Serikat yaitu melakukan tindakan-tindakan “pre-emptive” dengan menuduh Omar Al-Bhasir atas genocide yang terjadi pada tahun 2003 hingga sekarang yang menewaskan sekitar 200.000 sampai 500.000 orang di Darfur.

²³*Dampak Kenaikan Harga Minyak Terhadap Perekonomian Amerika*,
<http://granadamediatama.wordpress.com/2008/10/14/ashabu-raayati-suud/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2010

Amerika Serikat pada akhirnya memanfaatkan konflik Darfur yang terjadi tahun 2003 untuk menjadi batu loncatan agar dengan melalui ICC dalam tempo kepentingan jangka panjang, Amerika Serikat (mungkin) dapat menganeksasi Sudan dan mendapatkan minyaknya secara total.

D. Hipotesa

Berdasarkan seluruh fenomena yang ada, maka penulis akhirnya sampai pada hipotesa yaitu bahwa kepentingan Amerika dalam konflik di Sudan adalah semata-mata untuk menguasai sumber daya alam dan kekayaan yang dimiliki oleh Sudan, terutama minyak bumi, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi negaranya.

E. Jangkauan Penelitian

Batasan penting ditetapkan agar kajian ini bisa lebih terfokus. Dengan alasan tersebut, maka penulis menetapkan batasan kajian penelitian yaitu sejak tahun 2003 – 2010. Tak beda dengan operasi-operasi di negara lainnya, Amerika dan sekutunya bermain dengan kepentingan yang sama di Sudan yaitu memburu kekayaan alam Sudan. Dua daerah konflik; Sudan Barat dan Selatan merupakan daerah-daerah kaya akan sumber daya alamnya. Bagian Barat atau Darfur, menyimpan cadangan emas hitam yang menggiurkan.

F. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan metode studi pustaka. Oleh karena itu, data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah merupakan data sekunder yang meliputi buku, makalah ilmiah, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, surat kabar, data internet, dan literatur lain yang dianggap relevan. Semua data tersebut pada akhirnya akan dianalisis dengan menggunakan konsep dan teori yang telah ditetapkan sebelumnya.

G. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui dan memahami lebih jelas mengenai dinamika Konflik di Sudan, serta adanya Keterlibatan Negara- Negara Asing di dalamnya.
- Dapat menerapkan teori-teori yang didapat selama di bangku kuliah.
- Untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang S1 pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan

Kajian ini direncanakan akan terdiri dari lima bab. Masing-masing bab menengahkan persoalan sebagai berikut :

Bab I : Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi Latar

Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penulisan, Metode Pengumpulan Data, Tujuan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

- Bab II : Bab Kedua menceritakan tentang Konflik di Sudan
- Bab III : Bab ketiga berisi gambaran mengenai Keterlibatan Negara-Negara Asing dalam Konflik di Sudan
- Bab IV : Pada bab keempat merupakan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan Amerika Serikat dalam Konflik di Sudan
- Bab V : Bab terakhir merupakan keseluruhan isi materi skripsi yang dikumpulkan dalam bentuk kesimpulan